



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 10 Mei 2011

Halaman: 28

:: agenda kota ::
SPIP Diterapkan di Seluruh SKPD

Yulianingsih

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DIY untuk pelaksanaan instruksi presiden Nomor 4 tahun 2011 berupa percepatan akuntabilitas keuangan daerah maka Pemkot Yogyakarta telah menyusun beberapa langkah kongkret yang langsung ditindaklanjuti instansi terkait.

Salah satu yang dilakukan Pemkot setempat adalah penggunaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Melalui sistem tersebut semua pelaporan pengelolaan keuangan daerah akan diawasi lebih ketat lagi.

"Ini merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta untuk menghindari adanya penyelewengan keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan akan menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel," terang Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta Wahyu Widayat.

Menurutnya, program tersebut diawal tahun 2011 ini baru

akan dilaksanakan di lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD tersebut adalah Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Inspektorat Kota Yogyakarta.

"Target kami, semua instansi dan SKPD sudah harus menggunakan SPIP hingga akhir tahun 2011 ini. Dan untuk pengawasan dan evaluasi, pada tiap instansi dan SKPD akan dibentuk satuan tugas (Satgas) khusus," tambahnya.

Menurutnya, dengan adanya SPIP diharapkan tidak ada lagi temuan mengenai dugaan penyelewengan keuangan daerah karena dengan sistem ini tiap pelaporan akan lebih terperinci dan tidak dapat dimanipulasi. Jika terjadi masalah, Pemkot Yogyakarta pun dapat segera menanggapinya sebelum berkembang menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta, Septi Sri

Rejeki menambahkan, tahun 2009 lalu terdapat 22 temuan administrasi di SKPD. Saat ini 21 temuan di antaranya telah diselesaikan, sedangkan satu lainnya masih dalam proses penyelesaian. "Dapat dikatakan, Pemkot Yogyakarta telah mampu menyelesaikan 99 persen temuan yang ada dilapangan. Namun untuk tahun 2010 sendiri, saat ini masih dalam proses audit BPK," jelasnya.

Diakui, dalam SPIP tersebut akan ada lima unsur yang

akan dilakukan yakni lingkungan pengendalian SKPD, penilaian resiko, komunikasi dan informasi, kegiatan pemantauan dan pengawasan. Kelima unsur tersebut akan diawasi pelaksanaannya oleh satgas di setiap SKPD. Satgas sendiri harus sudah terbentuk bulan Mei mendatang. Melalui langkah ini diharapkan tidak akan ada lagi temuan penyelewengan keuangan daerah di setiap SKPD di Kota Yogyakarta nantinya.

■ ed: heri purwata



Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi
<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk diketahui
<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Bangunan Gedung dan Aset	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005